

PELATIHAN

Implementasi Manajemen Risiko di Sektor Publik berbasis SNI ISO 31000:2018

5-7 Februari 2020 | Jakarta
17-19 Juni 2020 | Banyuwangi
12-14 Agustus 2020 | Yogyakarta
18-20 November 2020 | Bandung



CRMS

Center for
Risk Management
& Sustainability



Winner
Risk Management Service
Provider of the Year



Risk Management Service
Provider of the Year

Risk Management Service Provider of the Year



QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV-GL
ISO 9001

POINT
PDUs

ERMA & LSP MKS
Certification Holder

Sinopsis



Saat ini, penerapan manajemen risiko bagi organisasi sektor publik telah menjadi suatu keharusan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.



RANCANGAN TEKNOKRATIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan



Pelatihan Manajemen Risiko Sektor Publik SNI ISO 31000 2018 ini disiapkan dan dirancang oleh CRMS Indonesia untuk memberikan pemahaman dan perspektif manajemen risiko yang sudah menjadi kebutuhan organisasi sektor publik bagi para praktisi yang saat ini aktif di berbagai lembaga negara, lembaga kementerian, organ pemerintahan (pusat dan daerah seperti Pemprov, Kabupaten/Kota), BUMN, BUMD, dan bahkan organisasi nirlaba serta akademisi yang bersinggungan dengan kepentingan sektor publik.

Sasaran utama organisasi sektor publik adalah terus meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui berbagai pelayanan publik yang diberikan. Dalam pencapaian sasaran tersebut, organisasi sektor publik banyak menghadapi ketidakpastian yang berasal dari faktor eksternal dan internal.

Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya jumlah dan jenis risiko yang dihadapi oleh organisasi sektor publik, mereka membutuhkan penerapan manajemen risiko yang efektif dan terstandarisasi, serta sejalan dengan rujukan aturan dan peraturan yang relevan, seperti:

UUD 1945 Pasal 23 yang mengatur tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; serta PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Standar Manajemen Risiko Sektor Publik SNI ISO 31000:2018 hadir menjadi acuan bagi organisasi sektor publik.

Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



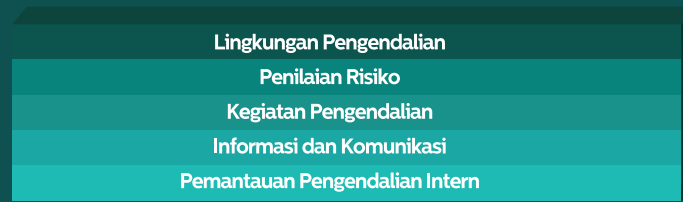
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan

Indikator, antara lain:

- 1) Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, pengembangan kompetensi, dan pola karir
- 2) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansional
- 3) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional
- 4) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi
- 5) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi
- 6) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
- 7) Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan maturitas level III
- 8) Jumlah unit pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan publik
- 9) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui LAPOR! SP4N

Selain itu, untuk menerapkan unsur terkait penilaian risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), organisasi sektor publik dapat menerapkan sistem manajemen risiko sesuai dengan Standar Manajemen Risiko Sektor Publik SNI ISO 31000:2018 ini.



Peserta dapat memilih untuk mengikuti workshop 3 hari penuh (dari hari pertama sampai ke-3) atau hari ke-2 sampai ke-3 saja.

Hari pertama khusus membahas fundamentals SNI ISO 31000, untuk menjembatani pemahaman peserta terkait manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000 sebelum membahas lebih dalam ke arah implementasinya pada hari ke-2 dan ke-3.

Manfaat

Tujuan implementasi manajemen risiko di organisasi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai organisasi dalam rangka mencapai visi misi yang ditetapkan, dengan cara:

- Memahami konsep dasar ketidakpastian dan risiko sektor publik.
- Memahami SNI ISO 31000 sebagai standar nasional manajemen risiko.
- Memahami aspek fundamental manajemen risiko sektor publik, misalnya paparan aset terhadap risiko, paparan utang terhadap risiko, serta prinsip-prinsip pembiayaan risiko.
- Mempelajari pengalaman praktis penerapan manajemen risiko sektor publik.
- Mempelajari administrasi program manajemen risiko sektor publik.
- Simulasi analisis pengambilan keputusan berbasis risiko.

Peserta

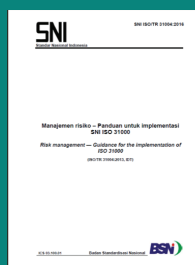
- Praktisi manajemen risiko sektor pemerintahan baik pusat maupun daerah.
- Praktisi manajemen risiko BUMN pelayanan publik.
- Praktisi manajemen risiko di berbagai lembaga negara.
- Pelaksana dan penanggung jawab di proyek pemerintah terutama untuk pembangunan infrastruktur baik yang berbentuk PPP (*Public Private Partnerships*) maupun yang murni milik pemerintah atau swasta.
- Penyelenggara program donor pelayanan publik.
- Pelaksana dan penanggung jawab berbagai inisiatif pemerintah yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas, misalnya asuransi sosial, perbankan mikro dan pedesaan, perluasan bandara dan pelabuhan laut, dan pembangunan energi swadaya masyarakat.

SILABUS PELATIHAN

- Konsep dasar ketidakpastian dan risiko sektor publik;
- Overview Standar Manajemen Risiko Sektor Publik SNI ISO 31000:2018;
- Implementasi Prinsip Manajemen Risiko Sektor Publik;
- Implementasi Kerangka Kerja Manajemen Risiko Sektor Publik seperti membuat peta jalan penerapan manajemen risiko dan struktur manajemen risiko;
- Implementasi Proses Manajemen Risiko Sektor Publik seperti melakukan proses penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko) dan proses perlakuan risiko.



SNI ISO 31000:2018
Manajemen Risiko - Pedoman



SNI ISO 31004
Panduan Untuk Implementasi
SNI ISO 31000



Panduan Implementasi
SNI ISO 31000:2018 di
Sektor Publik

Host

Program ini akan didampingi serta difasilitasi oleh *host* atau fasilitator ahli dari CRMS Indonesia. Selain itu juga dapat mengundang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman praktis dengan para peserta



Adnan Pandu Pradja, SH., Sp.N., L.L.M.

Pakar bidang hukum yang aktif berbagi pengalaman, opini dan pengetahuan melalui artikel/tulisan di media masa. Beliau pernah menjabat sebagai wakil Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan merupakan anggota ISO/TC 309 Governance of organizations yang kerap mewakili Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan internasional ISO di berbagai negara, di antaranya ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (2017).

Selain berperan sebagai advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Adnan Pandupraja aktif sebagai Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-10 Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan di Badan Standardisasi Nasional (BSN). Beliau pernah menjadi dan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Anggota Kelompok Kerja Reformasi Penegakan Hukum dan Peradilan (Pokja RPHP) Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Beliau juga aktif sebagai anggota KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dan memiliki pengalaman sebagai Staff Khusus Menteri Perindustrian.



Dr. Antonius Alijoyo

Praktisi dan akademisi yang sarat pengalaman dalam bidang manajemen risiko baik di tingkat nasional maupun internasional di berbagai negara di antaranya: Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Inggris, Skotlandia, Australia, Spanyol, Belanda, Perancis, Norwegia, Hungaria, Polandia, Afrika, Swiss, Singapura, Cina dan Uni Arab Emirates (UAE),

Saat ini aktif sebagai Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-10 Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan di Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan juga berperan sebagai ketua dewan pengarah/pengawas berbagai asosiasi bidang tatakelola (KNKG), manajemen risiko (IRMAPA) dan kepatuhan (ICoPI). Sebelumnya, beliau pernah berkarya di beberapa institusi publik di antaranya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai dewan audit, di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai komite manajemen risiko, dan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai steering committee teknologi informasi dan manajemen risiko. Di samping itu, beliau juga pernah dan masih menjabat di berbagai institusi swasta sebagai komisar independen.



Dr. Waluyo

Pakar bidang sektor publik dengan pengalaman sebagai Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN), yang membangun komisi baru untuk mengawal pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ikut membangun kesisteman di awal terbentuknya organisasi KPK dan melakukan program transformasi selama di Pertamina.

Beliau juga adalah Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-10 Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan di Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan anggota ISO/TC 309 *Governance of organizations* yang kerap mewakili Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan internasional ISO di berbagai negara di antaranya: Amerika Serikat, Eropa, Australia dan Asia. Beliau juga adalah Wakil Ketua Bidang Governance Publik dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Beliau berpengalaman lebih dari 30 tahun di organisasi modern, baik di perusahaan dunia (BP, merger company of British Petroleum, Amoco, Atlantic Richfield Company dan Veba) maupun di BUMN Pertamina dengan penugasan dan kepemimpinan baik di operasional maupun bisnis pendukung.

CRMS

Jl. Batununggal Indah IV No. 97
Bandung - 40267, Indonesia
Phone. (+6222) 8730-1035
Mobile. (+62) 81 222 200 775

Website. www.crmsindonesia.org
Email. secretariat@crmsindonesia.org

Our Social Media

 CRMS Indonesia
 @crmsindonesia
 CRMS Indonesia
 CRMS Indonesia
 @crmsindonesia